

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengatur pengancaman nilai pidana denda yang telah ditentukan dalam rumusan delik. Dalam menghadapi perkembangan zaman, pengaturan pidana denda model itu akan menyebabkan memudarnya penerapan asas proporsionalitas dikarenakan adanya ketertinggalan nilai mata uang sehingga besaran pidana denda tersebut semakin lama menjadi tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam pemidanaan, asas proporsionalitas menjadi asas yang memegang peranan penting dimana menuntut adanya perimbangan antara sanksi pidana dengan tingkat seriuritas tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diteliti adalah UU PTPK serta bahan hukum lain yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seyogyanya dibutuhkan pemahaman bersama mengenai ide proporsionalitas pada semua tahapan/kewenangan pemidanaan (legislatif, yudikatif, eksekutif) utamanya oleh kewenangan legislatif yang akan menjadi inspirasi dalam pembaharuan pidana denda dalam UU PTPK. Pidana denda dalam UU PTPK yang sesuai dengan asas proporsionalitas dapat mengacu pada model pidana denda yang mengatur perubahan nilai mata uang dengan Peraturan Pemerintah, serta yang mengatur nilai pengancaman pidana denda dengan nilai barang pada saat itu sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman yang dapat diadopsi dan diimplementasikan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pembaharuan UU PTPK oleh para pembentuk undang-undang.

Kata Kunci: Pidana denda - Tindak Pidana Korupsi - Asas Proporsionalitas

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU PTPK) regulates the threat of a criminal fine which has been determined in the formulation of the offense. In the face of the times, the regulation of criminal penalties for this model will cause the application of the principle of proportionality to wane due to the lagging value of the currency so that the amount of the criminal fine is increasingly disproportionate to the crime committed. Whereas in sentencing, the principle of proportionality becomes a principle that plays an important role which demands a balance between criminal sanctions and the level of seriousness of the crime.

The research method used is normative. The approach taken is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials studied are the PTPK Law and other relevant legal materials. Legal materials were collected by literature study. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this study indicate that a common understanding of the idea of proportionality at all stages/criminal authorities (legislative, judicial, executive) especially by legislative authorities is needed which will be the inspiration in reforming criminal penalties in the PTPK Law. The fines in the PTPK Law in accordance with the principle of proportionality can refer to the criminal model of fines that regulates changes in currency values with Government Regulations, and which regulates the value of the threat of fines with the value of the goods at that time so that they always follow the times that can be adopted and implemented in the future. laws and regulations in Indonesia, especially in the renewal of the PTPK Law by legislators.

Keywords: Fines - Corruption - The Principle of Proportionality

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.4.1. Kegunaan Teoritis	10
1.4.2. Kegunaan Praktis	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	18
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBAHARUAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ASAS PROPORSIONALITAS.....	19
2.1. Pembaharuan Pidana Denda dan Asas Proporsionalitas	19
2.1.1. Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi	19
2.1.2. Asas Proporsionalitas.....	39
2.1.3. Pembaharuan Hukum Pidana.....	46
2.2. Pengaturan Pidana Denda Berkaitan dengan Asas Proporsionalitas.....	50
2.2.1. Pidana Denda dalam Rancangan KUHP dan UU Pidana Lain	50

2.2.2.	Pidana Denda dalam Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955	55
BAB III	URGENSI PEMBAHARUAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERKAITAN DENGAN ASAS PROPORSIONALITAS.....	56
3.1.	Urgensi Pembaharuan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi Berkaitan dengan Asas Proporsionalitas	56
3.1.1.	Pengaturan Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	59
3.1.2.	Asas Proporsionalitas Berkaitan dengan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi	66
3.1.3.	Pembaharuan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi.....	78
3.2.	Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai Dengan Asas Proporsionalitas	90
3.2.1.	Pidana Denda dalam Rancangan KUHP dan UU Pidana Lain	90
3.2.2.	Pidana Denda dalam UU Drt Nomor 7 Tahun 1955	98
BAB IV	PENUTUP	104
4.1.	Kesimpulan	104
4.2.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		106
BIODATA PENULIS.....		110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Tahun 2002 dan 2021 ..	5
Tabel 2	Keaslian.....	11
Tabel 3	Tindak Pidana Korupsi dalam UU PTPK	59
Tabel 4	Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi dalam UU PTPK.....	59
Tabel 5	Sebaran Tindak Pidana dan Ancaman Pidana dalam UU PTPK	61
Tabel 6	Pidana Denda Rancangan KUHP.....	90
Tabel 7	Perbandingan Pidana Denda dalam UU TPPU, UU Tipinar dan UU PPLH.....	94